



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 17 TAHUN 2026

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka Bupati Grobogan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 secara aklamasi 35 (tiga puluh lima) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dapat menyetujuinya Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 beserta lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Diktum KESATU adalah
sebagai berikut :

1) Laporan Realisasi Anggaran, meliputi :

a) Pendapatan	Rp 3.058.532.310.773,00
b) Belanja	<u>Rp 2.976.476.442.558,00</u>
Surplus	Rp 82.055.868.215,00
c) Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 115.619.287.899,00
- Pengeluaran	<u>Rp 4.950.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 110.669.287.899,00

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai berikut :

Selisih Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan Saldo
Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

a) Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 115.683.430.714,00
b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>(Rp 115.619.287.899,00)</u>
Selisih	Rp 64.142.815,00
c) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 192.725.156.114,00
d) Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e) Lain-lain	(Rp 64.142.815,00)
f) Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 192.725.156.114,00

3) Neraca, sebagai berikut :

a) Jumlah Aset	Rp 5.370.445.715.366,34
b) Jumlah Kewajiban	Rp 23.068.945.272,95
c) Jumlah Ekuitas	Rp 5.347.376.770.093,39
d) Jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp 5.370.445.715.366,34

4) Laporan Operasional, sebagai berikut :

a) Pendapatan Operasional	Rp 2.877.374.940.192,87
---------------------------	-------------------------

b) Beban Operasional	Rp	<u>2.610.469.569.324,22</u>
c) Surplus dari Operasional	Rp	266.905.370.868,65
d) Surplus Non Operasional	Rp	28.053.366.150,53
e) Defisit Non Operasional	Rp	<u>23.707.950.319,49</u>
f) Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp	4.345.415.831,04
g) Surplus sebelum Pos Luar Biasa	Rp	271.250.786.699,69
h) Surplus dari Pos_Luar Biasa	(Rp	<u>10.005.481,00)</u>
i) Surplus Laporan Operasional	Rp	271.240.781.218,69

5) Laporan Arus Kas, sebagai berikut :

a) Saldo Kas Awal per Januari 2025	Rp	115.938.206.366,00
b) Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	461.377.271.668,00
c) Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp	384.271.403.453,00)
d) Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	(Rp	0,00)
e) Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp	153.674.084,00)
f) Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2025	Rp	192.826.257.682,00

6) Laporan Perubahan Ekuitas

a) Ekuitas Awal	Rp	5.076.231.195.424,70
b) Surplus Laporan Operasional	Rp	271.240.781.218,69
c) Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp	95.206.550,00)
d) Ekuitas Akhir	Rp	5.347.376.770.093,39

7) Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

- KETIGA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 selengkapnya sebagaimana Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5 dan Lampiran 6 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, selengkapnya sebagaimana Lampiran 7 Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 9 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,

LUSIA INDAH ARTANI

- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
 2. Bupati Grobogan.
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Republik Indonesia di Jakarta (terkait);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
4. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Reff	Anggaran 2025 Rp	Realisasi 2025 Rp	%	Realisasi 2024 Rp
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	A.5.1.1.1				
Pajak Daerah-LRA	A.5.1.1.1.a	307.127.012.000,00	320.323.545.698,00	104,30	183.530.687.212,00
Retribusi Daerah-LRA	A.5.1.1.1.b	204.410.792.200,00	227.999.810.291,00	111,54	262.887.243.076,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	A.5.1.1.1.c	36.249.541.000,00	40.299.223.169,00	111,17	35.514.162.963,00
Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	A.5.1.1.1.d	75.436.889.268,00	83.181.745.229,00	110,27	10.698.437.626,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	A.5.1.1.1	623.224.234.468,00	671.804.324.387,00	107,79	492.630.530.877,00
PENDAPATAN TRANSFER	A.5.1.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat-LRA	A.5.1.1.2.a	2.203.151.117.709,00	2.233.861.451.738,00	101,39	2.197.787.354.069,00
Pendapatan Transfer antar Daerah-LRA	A.5.1.1.2.b	179.374.330.364,00	152.866.534.648,00	85,22	233.245.371.807,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	A.5.1.1.2	2.382.525.448.073,00	2.386.727.986.386,00	100,18	2.431.032.725.876,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	A.5.1.1.3				
Pendapatan Hibah-LRA	A.5.1.1.3.a	0,00	0,00	0,00	1.224.000.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	A.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1.224.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	A.5.1.1	3.005.749.682.541,00	3.068.532.310.773,00	101,76	2.924.887.266.753,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI	A.5.1.2.1				
Belanja Pegawai	A.5.1.2.1.1	1.324.190.582.779,00	1.271.855.372.068,00	96,05	1.190.778.119.599,00
Belanja Barang dan Jasa	A.5.1.2.1.2	744.426.094.306,00	701.050.484.578,00	94,17	709.708.037.962,00
Belanja Bunga	A.5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	535.363.742,00
Belanja Subsidi	A.5.1.2.1.4	940.448.000,00	940.424.750,00	100,00	940.982.500,00
Belanja Hibah	A.5.1.2.1.5	128.785.224.880,00	126.103.571.106,00	97,92	190.663.150.390,00
Belanja Bantuan Sosial	A.5.1.2.1.6	25.534.312.000,00	25.342.567.317,00	99,25	25.245.918.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	A.5.1.2.1	2.223.876.661.965,00	2.125.292.419.819,00	95,57	2.117.871.672.193,00
BELANJA MODAL	A.5.1.2.2				
Belanja Modal Tanah	A.5.1.2.2.1	1.597.198.250,00	442.942.700,00	27,73	1.322.155.262,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	A.5.1.2.2.2	108.667.380.975,00	100.818.574.872,00	92,78	90.450.708.494,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	A.5.1.2.2.3	142.761.884.429,00	135.673.990.305,00	95,04	113.228.180.416,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.5.1.2.2.4	143.576.969.431,00	129.244.366.909,00	90,02	116.674.746.358,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	A.5.1.2.2.5	15.058.191.190,00	14.749.290.224,00	97,95	9.057.036.988,00
Belanja Modal Aset Lainnya	A.5.1.2.2.6	650.980.000,00	408.104.963,00	62,69	218.092.638,00
JUMLAH BELANJA MODAL	A.5.1.2.2	412.312.584.275,00	381.337.289.973,00	92,49	331.160.920.166,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	A.5.1.2.3				
Belanja Tidak Terduga	A.5.1.2.3	12.201.148.015,00	5.411.184.766,00	44,35	12.319.371.859,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	A.5.1.2.3	12.201.148.015,00	5.411.184.766,00	44,35	12.319.371.859,00
BELANJA TRANSFER	A.5.1.2.4				
Belanja Bagi Hasil	A.5.1.2.4.1	32.072.982.000,00	32.072.982.000,00	100,00	18.151.847.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	A.5.1.2.4.2	436.019.737.000,00	432.362.566.000,00	99,16	440.338.980.000,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	A.5.1.2.4	468.092.719.000,00	464.435.548.000,00	99,22	458.490.827.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	A.5.1.2	3.116.483.113.255,00	2.976.476.442.558,00	95,51	2.919.832.691.208,00
SURPLUS/(DEFISIT)	A.5.1.3	-110.733.430.714,00	82.055.868.215,00	(74,10)	5.054.565.545,00

URAIAN	Reff	Anggaran 2025 Rp	Realisasi 2025 Rp	%	Realisasi 2024 Rp
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	A.5.1.5.1				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	A.5.1.5.1.1	115.683.430.714,00	115.619.287.899,00	99,94	151.302.424.080,00
Pencairan Dana Cadangan	A.5.1.5.1.3	0,00	0,00	0,00	26.412.926.009,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	A.5.1.5.1	115.683.430.714,00	115.619.287.899,00	99,94	177.715.350.069,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	A.5.1.5.2				
Pembentukan Dana Cadangan	A.5.1.5.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	A.5.1.5.2.2	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	100,00	5.450.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	A.5.1.5.2.3	0,00	0,00	0,00	61.636.484.900,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	A.5.1.5.2	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	100,00	67.086.484.900,00
PEMBIAYAAN NETTO	A.5.1.5	110.733.430.714,00	110.669.287.899,00	99,94	110.628.865.169,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	A.5.1.5.3	0,00	192.725.166.114,00	~	115.683.430.714,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini


DPRD KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

LUSIA INDAH ARTANI



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No	URAIAN	Reff	TAHUN 2025	TAHUN 2024
			Rp	Rp
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	B.1.	115.683.430.714,00	151.489.829.021,00
2.	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	B.2.	(115.619.287.899,00)	(151.302.424.060,00)
3.	Sub Total		64.142.815,00	187.404.961,00
4.	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/(SIKPA))	B.3.	192.725.156.114,00	115.683.430.714,00
5.	Sub Total		192.789.298.929,00	115.870.835.675,00
6.	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7.	Lain-lain	B.4.	(64.142.815,00)	(187.404.961,00)
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	B.5.	192.725.156.114,00	115.683.430.714,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

DPRD KABUPATEN GROBOGAN
KETUA
LUSIA INDAH ARTANI



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
NERACA
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp	Rp
ASET	C.5.1.7		
ASET LANCAR	C.5.1.7.A		
Kas dan Setara Kas	C.5.1.7.A.1	192.826.257.682,00	115.939.206.388,00
Kas di Kas Daerah	C.5.1.7.A.1.a	147.390.754.563,00	81.152.063.112,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.5.1.7.A.1.b	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.5.1.7.A.1.c	0,00	0,00
Kas di BLUD	C.5.1.7.A.1.d	43.965.064.912,00	33.373.378.670,00
Kas Dana Bos	C.5.1.7.A.1.e	0,00	83.013.884,00
Kas Lainnya	C.5.1.7.A.1.f	13.415.236,00	30.977.103,00
Kas Dana BOSP	C.5.1.7.A.1.g	103.255.588,00	1.051.650,00
Kas Dana BOK Puskesmas	C.5.1.7.A.1.h	1.353.767.383,00	1.297.721.967,00
Investasi Jangka Pendek	C.5.1.7.A.2	0,00	0,00
Piutang Pajak	C.5.1.7.A.3	4.608.110.867,00	4.021.177.184,00
Piutang Retribusi	C.5.1.7.A.4	25.697.758.669,00	25.561.726.255,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	C.5.1.7.A.6	1.059.359.942,00	3.422.538.904,00
Piutang Transfer Antar Daerah	C.5.1.7.A.8	15.149.770.687,00	12.880.399.943,00
Piutang Lainnya	C.5.1.7.A.9	10.423.409.558,11	10.545.620.508,11
Penyisihan Piutang	C.5.1.7.A.10	(14.272.044.854,22)	(14.205.850.345,29)
Beban Dibayar Dimuka	C.5.1.7.A.11	430.381.549,00	486.194.792,00
Persediaan	C.5.1.7.A.12	32.887.182.670,85	24.278.715.619,13
JUMLAH ASET LANCAR	C.5.1.7.A	268.610.186.770,74	182.908.729.225,95
INVESTASI JANGKA PANJANG	C.5.1.7.B		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		347.199.252.478,43	328.275.978.136,44
Penyertaan Modal Pemkab	C.5.1.7.B	347.199.252.478,43	328.275.978.136,44
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	C.5.1.7.B	347.199.252.478,43	328.275.978.136,44
ASET TETAP	C.5.1.7.C		
Tanah	C.5.1.7.C.1	954.391.230.842,00	953.604.678.729,00
Peralatan dan Mesin	C.5.1.7.C.2	1.129.160.469.382,00	1.007.633.094.355,00
Gedung dan Bangunan	C.5.1.7.C.3	2.025.422.173.915,64	1.863.372.925.357,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.5.1.7.C.4	3.427.923.752.585,00	3.300.603.120.351,00
Aset Tetap Lainnya	C.5.1.7.C.5	204.702.644.333,00	190.201.920.109,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.5.1.7.C.6	8.211.897.287,00	12.497.255.656,00
Akumulasi Penyusutan	C.5.1.7.C.7	(3.175.127.649.505,37)	(2.910.355.646.875,74)
JUMLAH ASET TETAP	C.5.1.7.C	4.574.684.518.839,27	4.417.557.347.681,26
ASET LAINNYA	C.5.1.7.E		
Aset Tidak Berwujud	C.5.1.7.E.3	7.995.810.590,00	8.067.297.234,00
Aset Lain-lain	C.5.1.7.E.4	96.904.097.808,00	87.325.366.170,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	C.5.1.7.E.5	(5.099.169.481,71)	(5.406.013.761,86)
Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	C.5.1.7.E.6	(52.266.411.328,39)	(57.333.408.047,02)
JUMLAH ASET LAINNYA	C.5.1.7.E	47.534.327.587,90	32.653.241.595,12
PROPERTI INVESTASI	C.5.1.7.F		
Properti Investasi	C.5.1.7.F	132.417.429.690,00	132.417.429.690,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	C.5.1.7.F	132.417.429.690,00	132.417.429.690,00
JUMLAH ASET	C.5.1.7	5.370.445.715.366,34	5.093.812.726.328,76
KEWAJIBAN	C.5.1.8		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5.1.8.1		
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.1.8.1.d	1.236.741.550,95	939.234.477,07
Utang Belanja	C.5.1.8.1.e	21.731.102.154,00	16.387.520.775,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.1.8.1.f	101.101.568,00	254.775.652,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5.1.8.1	23.068.945.272,95	17.581.530.904,07
JUMLAH KEWAJIBAN	C.5.1.8	23.068.945.272,95	17.581.530.904,07

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
EKUITAS	C.5.1.9.	5.347.376.770.093,39	5.076.231.195.424,70
JUMLAH EKUITAS	C.5.1.9.	5.347.376.770.093,39	5.076.231.195.424,70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.370.445.715.366,34	5.093.812.726.328,77

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

KETUA DPRD KABUPATEN GROBOGAN
KETUA
LUSIA INDAH ARTANI



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	D.1.1	2.877.374.940.192,87	2.693.114.760.744,95	184.260.189.447,92	6,84
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	D.1.1.1	683.033.993.820,11	505.201.308.668,27	177.832.685.151,84	35,20
Pajak Daerah - LO	D.1.1.1.a	320.743.430.402,62	184.345.199.096,52	136.398.231.306,10	73,99
Retribusi Daerah - LO	D.1.1.1.b	228.012.034.559,50	268.234.749.382,53	-40.222.714.823,03	(15,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	D.1.1.1.c	54.272.497.510,99	42.639.300.945,22	11.633.196.565,77	27,28
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	D.1.1.1.d	80.006.031.347,00	9.982.059.244,00	70.023.972.103,00	701,50
PENDAPATAN TRANSFER - LO	D.1.1.2	2.085.701.255.130,00	2.116.215.496.960,00	-30.514.241.830,00	(1,44)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	D.1.1.2.a	1.930.565.349.738,00	1.876.680.461.069,00	53.884.888.669,00	2,87
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	D.1.1.2.b	155.135.905.392,00	239.535.035.891,00	-84.399.130.499,00	(35,23)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	D.1.1.3.	108.639.691.242,76	71.697.945.116,68	36.941.746.126,08	51,52
Pendapatan Hibah - LO	D.1.1.3.a	108.639.691.242,76	71.697.945.116,68	36.941.746.126,08	51,52
BEBAN	D.1.2	2.610.469.569.324,22	2.595.206.880.784,68	15.262.688.539,54	0,59
BEBAN OPERASI	D.1.2.1	2.449.330.123.324,22	2.453.195.081.784,68	-3.864.958.460,46	(0,16)
Beban Pegawai	D.1.2.1.a	1.273.641.165.350,00	1.192.212.591.568,00	81.428.573.782,00	6,83
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.1.b	708.643.428.027,89	712.881.037.304,18	-4.237.609.276,29	(0,59)
Beban Bunga	D.1.2.1.c	0,00	390.364.538,00	-390.364.538,00	(100,00)
Beban Subsidi	D.1.2.1.d	944.542.993,00	611.443.497,00	333.099.496,00	54,48
Beban Hibah	D.1.2.1.e	134.596.191.676,02	212.162.800.896,31	-77.566.609.220,29	(36,56)
Beban Bantuan Sosial	D.1.2.1.f	41.481.580.319,00	45.312.342.366,00	-3.850.762.047,00	(8,50)
Beban Penyisihan Piutang	D.1.2.1.g	875.410.900,10	401.787.757,08	473.623.143,02	117,88
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.1.h	289.167.804.058,21	289.222.713.858,11	-54.909.799,90	(0,02)
BEBAN TRANSFER	D.1.2.2	161.139.446.000,00	142.011.799.000,00	19.127.647.000,00	13,47
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	D.1.2.2.a	30.712.702.000,00	16.920.538.000,00	13.792.164.000,00	81,51
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	D.1.2.2.b	1.360.280.000,00	1.231.309.000,00	128.971.000,00	10,47
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	D.1.2.2.c	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	100,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	D.1.2.2.d	128.066.464.000,00	123.859.952.000,00	4.206.512.000,00	3,40
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.1.3	266.905.370.868,65	97.907.869.960,27	168.997.500.908,38	172,61
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL	D.2.1	28.053.366.160,53	21.169.447.921,66	6.883.918.228,87	32,52
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	D.2.1.1	453.839.111,13	259.220.122,61	194.618.988,52	75,08
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	D.2.1.2	27.599.527.039,40	20.910.227.799,05	6.689.299.240,35	31,99
DEFISIT NON OPERASIONAL	D.2.2.	23.707.950.319,49	9.408.698.730,00	14.299.251.589,49	151,98
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	D.2.2.1	10.523.600.157,61	2.737.656.787,38	7.785.943.370,23	284,40
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	D.2.2.2	13.184.350.161,88	6.671.041.942,62	6.513.308.219,26	97,64
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2	4.345.415.831,04	11.760.749.191,66	-7.415.333.360,62	63,05
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.3	271.250.786.699,69	109.668.619.151,93	161.582.167.547,76	147,34

POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	D.4.1	10.005.481,00	606.014.320,00	-596.008.839,00	(98,35)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	D.4	(10.005.481,00)	(606.014.320,00)	596.008.839,00	(98,35)
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	D.5	271.240.781.218,69	109.062.604.831,93	162.178.176.386,76	148,70

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

KETUA DPRD KABUPATEN GROBOGAN
DPRD KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,

LUSIA INDAH ARTANTI



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Catatan	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pajak Daerah	E.1.1.a	320.323.545.698,00	183.530.687.212,00
Penerimaan Retribusi Daerah	E.1.1.b	227.999.810.291,00	262.887.243.076,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	E.1.1.c	40.299.223.169,00	35.514.162.963,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	E.1.1.d	81.165.858.709,00	9.718.079.307,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	E.1.1.e	66.023.305.400,00	59.059.316.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	E.1.1.f	1.287.533.660.879,00	1.255.940.649.224,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	E.1.1.g	569.825.479.459,00	540.701.553.845,00
Penerimaan Dana Desa	E.1.1.h	303.298.102.000,00	316.479.028.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	E.1.1.i	7.182.904.000,00	25.606.807.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	E.1.1.j	141.766.230.648,00	209.011.181.807,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	E.1.1.k	11.100.304.000,00	24.234.190.000,00
Penerimaan Hibah	E.1.1.l	0,00	1.224.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	E.1.1	3.056.516.424.253,00	2.923.906.898.434,00
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Pegawai	E.1.2.a	1.271.855.372.068,00	1.190.778.119.599,00
Pembayaran Barang dan Jasa	E.1.2.b	701.050.484.578,00	709.708.037.962,00
Pembayaran Bunga	E.1.2.c	0,00	535.363.742,00
Pembayaran Subsidi	E.1.2.d	940.424.750,00	940.982.500,00
Pembayaran Hibah	E.1.2.e	126.103.571.106,00	190.663.150.390,00
Pembayaran Bantuan Sosial	E.1.2.f	25.342.567.317,00	25.245.918.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	E.1.2.g	5.411.184.766,00	12.319.371.859,00
Pembayaran Bagi Hasil	E.1.2.h	32.072.982.000,00	18.151.847.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	E.1.2.i	432.362.566.000,00	440.338.980.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	E.1.2	2.595.139.152.585,00	2.588.681.771.052,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	E.1	461.377.271.668,00	335.225.127.382,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	E.2.1.a	447.228.520,00	548.945.319,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	E.2.1.b	1.554.475.000,00	415.295.000,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	E.2.1.c	14.183.000,00	16.118.000,00
Pencairan Dana Cadangan	E.2.1.d	0,00	26.412.926.009,00
Jumlah Arus Masuk Kas	E.2.1	2.015.886.520,00	27.393.284.328,00
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Perolehan Tanah	E.2.2.a	442.942.700,00	1.322.155.262,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	E.2.2.b	100.818.574.872,00	90.450.708.494,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	E.2.2.c	135.673.990.305,00	113.228.180.416,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	E.2.2.d	129.244.386.909,00	116.874.746.358,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	E.2.2.e	14.749.290.224,00	9.057.036.988,00
Perolehan Aset Lainnya	E.2.2.f	408.104.963,00	218.092.638,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	E.2.2.g	4.950.000.000,00	5.450.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	E.2.2	386.287.289.973,00	336.600.920.156,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	E.2	-384.271.403.453,00	-309.207.635.828,00

URAIAN	Catatan	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	E.3.1.a	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	E.3.1	0,00	0,00
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Pokok Utang	E.3.2.a	0,00	61.636.484.900,00
Jumlah Arus Keluar Kas	E.3.2	0,00	61.636.484.900,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	E.3	0,00	-61.636.484.900,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4.1.a	150.429.434.833,04	166.990.214.048,60
Jumlah Arus Kas Masuk	E.4.1	150.429.434.833,04	166.990.214.048,60
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4.2.a	150.583.108.917,04	166.753.043.956,60
Jumlah Arus Kas Keluar	E.4.2	150.583.108.917,04	166.753.043.956,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	E.4.2	-153.674.084,00	237.170.092,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	E.5.1	76.952.194.131,00	-35.381.823.254,00
Saldo Awal Kas di BUD	E.5.2	115.938.206.366,00	151.507.434.581,00
Koreksi SILPA	E.5.3	-64.142.815,00	-187.404.961,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi		192.826.257.682,00	115.938.206.366,00
Saldo Akhir Kas di BUD	E.5.4	192.826.257.682,00	115.938.206.366,00
Kas di Kas Daerah		147.390.754.563,00	81.152.063.112,00
Kas di BLUD		43.965.064.912,00	33.373.378.670,00
Kas Dana BOS		0,00	83.013.864,00
Kas Lainnya		13.415.236,00	30.977.103,00
Kas Dana BOSP		103.255.588,00	1.051.650,00
Kas Dana BOK Puskesmas		1.353.767.383,00	1.297.721.967,00
Saldo Akhir Kas	E.5	192.826.257.682,00	115.938.206.366,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

DPRD KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

LUSIA INDAH ARTANI



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp
1.	EKUITAS AWAL	F.1.	5.076.231.195.424,70	4.967.355.995.553,77
2.	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	F.2.	271.240.781.218,69	109.062.604.831,93
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	F.3.	(95.206.550,00)	(187.404.961,00)
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	F.3.a	0,00	0,00
	KOREKSI PIUTANG	F.3.b	0,00	0,00
	KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	F.3.c	0,00	0,00
	KOREKSI INVESTASI JANGKA PANJANG	F.3.d	0,00	0,00
	KOREKSI ASET TETAP	F.3.e	0,00	0,00
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	F.3.f	0,00	0,00
	KOREKSI ASET LAINNYA	F.3.g	0,00	0,00
	KOREKSI AKUMULASI ASET LAIN-LAIN	F.3.h	0,00	0,00
	KOREKSI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	F.3.i	0,00	0,00
	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	F.3.j	(95.206.550,00)	(187.404.961,00)
4	EKUITAS AKHIR	F.4.	5.347.376.770.093,39	5.076.231.195.424,70

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

DPRD KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

LUSIA INDAH ARTANI

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 180.18/17 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 JULI 2026



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR... TAHUN...

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa untuk transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka diperlukan pengaturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp3.058.532.310.773,00
b. belanja	<u>Rp2.976.476.442.558,00</u>
surplus	Rp82.055.868.215,00
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp115.619.287.899,00
2. pengeluaran	<u>Rp4.950.000.000,00</u>
pembiayaan neto	Rp110.669.287.899,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar (Rp52.782.628.232,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan	
setelah perubahan	Rp3.005.749.682.541,00
2. realisasi	<u>Rp3.058.532.310.773,00</u>
selisih lebih	Rp52.782.628.232,00
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp140.006.670.697,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran belanja	
setelah perubahan	Rp3.116.483.113.255,00
2. realisasi	<u>Rp2.976.476.442.558,00</u>
selisih kurang	Rp140.006.670.697,00
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar (Rp192.789.298.929,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. surplus / defisit	
setelah perubahan	(Rp110.733.430.714,00)
2. realisasi	<u>Rp82.055.868.215,00</u>

- | | | |
|--|---------------|----------------------|
| | selisih lebih | Rp192.789.298.929,00 |
|--|---------------|----------------------|
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp64.142.815,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan | | |
| setelah perubahan | | Rp115.683.430.714,00 |
| 2. realisasi | | <u>Rp115.619.287.899,00</u> |
| selisih kurang | | Rp64.142.815,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan | | |
| setelah perubahan | | Rp4.950.000.000,00 |
| 2. realisasi | | <u>Rp4.950.000.000,00</u> |
| selisih | | Rp0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp64.142.815,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto | | |
| setelah perubahan | | Rp110.733.430.714,00 |
| 2. realisasi | | <u>Rp110.669.287.899,00</u> |
| selisih kurang | | Rp64.142.815,00 |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025, berupa selisih anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp192.725.156.114,00, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp115.683.430.714,00 |
| b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | <u>(Rp115.619.287.899,00)</u> |
| selisih | Rp64.142.815,00 |
| c. sisa lebih pembiayaan anggaran | Rp192.725.156.114,00 |
| d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya | Rp0,00 |
| e. lain-lain | (Rp64.142.815,00) |
| f. saldo anggaran lebih akhir | Rp192.725.156.114,00 |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| a. jumlah aset | Rp5.356.908.447.090,13 |
| b. jumlah kewajiban | Rp24.787.766.606,28 |
| c. jumlah ekuitas | Rp5.332.120.680.483,85 |
| d. jumlah kewajiban dan ekuitas | Rp5.356.908.447.090,13 |

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a. pendapatan operasional | Rp2.864.231.640.869,54 |
|---------------------------|------------------------|

b. beban operasional	<u>Rp2.612.133.342.186,23</u>
c. surplus dari kegiatan operasional	Rp252.098.298.683,31
d. surplus non operasional	Rp25.018.998.628,37
e. defisit non operasional	<u>Rp23.707.950.319,49</u>
f. surplus dari kegiatan non operasional	Rp1.311.048.308,88
g. surplus sebelum pos luar biasa	Rp0,00
h. defisit dari pos luar biasa	<u>(Rp10.005.481,00)</u>
surplus-LO	Rp253.399.341.511,19

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per Januari 2025	Rp115.938.206.366,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp461.377.271.668,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan	(Rp384.271.403.453,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp153.674.084,00)
f. koreksi SiLPA	(Rp64.142.815,00)
g. saldo kas akhir per 31 Desember 2025	Rp192.826.257.682,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp5.076.231.195.424,70
b. surplus/defisit laporan operasional	Rp253.399.341.511,19
c. koreksi ekuitas lainnya	Rp2.490.143.547,96
d. ekuitas akhir	Rp5.332.120.680.483,85

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam :

(1) Lampiran I berisi laporan realisasi anggaran;

- (2) Lampiran I.1 berisi ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- (3) Lampiran I.2 berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- (4) Lampiran I.3 berisi rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- (5) Lampiran I.4 berisi rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- (6) Lampiran II berisi laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- (7) Lampiran III berisi laporan operasional;
- (8) Lampiran IV berisi laporan perubahan ekuitas;
- (9) Lampiran V berisi neraca;
- (10) Lampiran VI berisi laporan arus kas;
- (11) Lampiran VII berisi catatan atas laporan keuangan;
- (12) Lampiran VIII berisi daftar rekapitulasi piutang daerah;
- (13) Lampiran IX berisi daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- (14) Lampiran X berisi daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- (15) Lampiran XI berisi daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- (16) Lampiran XII berisi daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- (17) Lampiran XIII berisi daftar rekapitulasi aset tetap;
- (18) Lampiran XIV berisi daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- (19) Lampiran XV berisi daftar rekapitulasi aset lainnya;
- (20) Lampiran XVI berisi daftar dana cadangan daerah;
- (21) Lampiran XVII berisi daftar kewajiban jangka pendek;
- (22) Lampiran XVIII berisi daftar kewajiban jangka panjang;
- (23) Lampiran XIX berisi daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- (24) Lampiran XX berisi ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- (25) Lampiran XX.1 berisi ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- (26) Lampiran XX.2 berisi ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 9 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

LUSIA INDAH ARTANI



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berisikan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam peraturan daerah ini disajikan Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 9 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,



LUSIA INDAH ARTANI